

(*Media Indonesia*, 29 November 2007) - Pusri Holding dan Kementerian Negara BUMN menyanggah keputusan pembatalan pasokan gas untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pasalnya, untuk memperjuangkan pasokan gas itu, Holding dan pemerintah sudah melakukan pembicaraan selama hampir setahun.

“Kalau akhirnya keputusannya swap juga, buat apa ada pembicaraan selama hampir setahun. Itu kan bisa diputuskan oleh Holding sendiri untuk swap gas antar pabrik pupuk,” ujar Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, se usai penandatanganan pakta integritas BUMN melawan korupsi di Jakarta, kemarin.

Menurut Didu, kementerian sebagai pengelola saham pemerintah di BUMN memilih untuk menjalankan PIM. Meski untuk itu ekspor gas ke Jepang dan Korea harus dikurangi. Pasalnya, dengan memasok gas ke PIM keuntungannya lebih besar ketimbang hanya mengekspor.

Menurut Said, keuntungan itu bukan hanya dari harga yang mencapai US\$350/ton saat ini. Tapi juga keuntungan dari penyerapan tenaga kerja dan jaminan pasokan pupuk bagi petani. Selain itu, Didu mengingatkan untuk tercapainya kesepakatan negosiasi pasokan gas bagi PIM, sudah banyak tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan. Sehingga, bila keputusan akhir PIM kembali dipasok melalui swap gas, segalanya menjadi sia-sia.

“Intinya kita menginginkan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas pemanfaatan gas,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika mengatakan, alternatif yang ada untuk PIM hanya swap. Pasalnya, saat ini Indonesia masih terikat komitmen pemenuhan gas untuk ekspor. Kendati begitu, ia mengingatkan PIM akan mendapat pasokan gas dari Medco mulai 2009. Sehingga, sambil menunggu pasokan dari Medco, swap gas bisa menjadi pengisi kebutuhan. “Untuk lapangan gas di Aceh yang dikelola Exxon dan Pertamina, semuanya sudah ada kontraknya. Sedangkan PIM sampai saat ini belum memiliki kontrak.”